

**PENGARUH ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR**

SKRIPSI



SYARAH MONIKA

105721113319

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**PENGARUH ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**SYARAH MONIKA
NIM 105721113319**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِيبَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ لَوْ أَنَّكُمْ كَفَرْتُمْ أَزِيدَنَّكُمْ رِيبًا وَلَوْ أَنَّكُمْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih”

(QS. Ibrahim: 7)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik
Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, orang-orang yang saya sayang dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Semua proses yang akan kamu jalani tidak akan mudah, tapi kamu harus yakin endingnya membuat kamu ga berhenti ngucap alhamdulillah



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Syarah Monika

No.Stambuk/ NIM : 105721113319

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteititi, diperiksa, dan diujikan di depan panitia
Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 17 juni 2023 di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN : 0930098801

Nasrullah, SE., M.M.
NIDN : 0914049104

Dekan

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM:651 507

Nasrullah, SE., M.M.
NBM:1151 132



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Syarah Monika, Nim: 105721113319 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0006/SK-Y/61201/091004/2023 M, Tanggal 11 DzulHijah 1444 H /22 Juni 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 DzulHijah 1444 H

22 Juni 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H Andi Rustam, SE., M.M., Ak.CA., CPA
2. Nasrullah, SE., M.M.
3. Dr. Hj. Ruliaty, M.M
4. Dr. Hj. Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak., CA

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M. Si.

NBM: 1651 507



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarah Monika
Stambuk : 105721113319
Program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Syarah Monika

NIM: 105721113319

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM:651 507

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

Nasrullah, SE., M.M.
NBM:1151 132

HALAMAN PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarah Monika

NIM : 105721113319

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 22 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Syarah Monika
NIM: 105721113319



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Keuangan Universitas Muhammadiyah Makassar. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya bapak Syamsir dan ibu Jumriah, yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do’a tulus tanpa pamrih. Saudara-saudara penulis, Kakak Elma Tania terimakasih selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis yang paling terbaik dan panutan penulis sejak bayi. Adik Ahyul Kayyum, Syaila Amelia dan Muh. Azhim Al-Habsy yang penulis sayangi. Serta seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do’a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu, Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai

pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrullah SE., MM Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Dosen Pembimbing II saya, terima kasih atas waktu, kesabaran, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Muchriana Muchran, SE.,M.Si.Ak.CA. Dosen pembimbing I, terima kasih atas waktu, kesabaran, dorongan, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah dan banyak menuangkan ilmunya kepada saya selama mengikuti perkuliahan.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019, Manajemen 19B khususnya Anggi, Hety, Esty, Nengsih, Atifha, Rama, Aidil, Dandi yang mempunyai misi yang sama dengan penulis, kalian inspirator sekaligus motivator terbaik yang selalu mendukung, terimakasih atas kenangan indah Bersama kalian selama ini.
8. Support system terbaik M. Rifki Henra Putrawan yang senantiasa menemani dan mendukung sampai saat ini.

9. Sahabat-sahabat penulis Linda, Isa, Diana, Rezki, Nunu, Risti, Muti, Rissa, Sigi dan Ammal yang harus semangat untuk mengejar cita-cita.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Makassar, 10 April 2023

Penulis

Syarah Monika



ABSTRAK

Syarah Monika, 2023, *Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Muchriana Muchran dan Nasrullah

Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengetahui Apakah penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder, dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh staf/pegawai di kantor BKAD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 38 pegawai. Adapun Metode Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji validitas, uji realibilitas, Uji asumsi klasik, Uji Analisis regresi linear berganda, dan Uji hipotesis dengan Uji Koefisien Determinasi (R^2) dan uji t (Uji Parsial). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. 2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. 3) Pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci : *Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal.*

ABSTRACT

Syarah Monika, 2023, *The Influence of Regional Financial Management Aspects on the Transparency of Regional Financial Management in Luwu Timur Regency. Thesis Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Muchriana Muchran and Nasrullah*

This study aims to examine whether the presentation of regional financial reports, accessibility of regional financial reports, and internal control affect the transparency of regional financial management in East Luwu Regency. This study used a type of quantitative research originating from primary and secondary data, by distributing questionnaires to all staff/employees at the East Luwu Regency BKAD office as many as 38 employees. The analytical methods used in this study are validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression analysis test, and hypothesis testing with the Coefficient of Determination Test (R²) and t test (Partial Test). The results of this study indicate that: 1) Presentation of regional financial reports has a positive and significant effect on the transparency of regional financial management. 2) The accessibility of regional financial reports has a positive and significant effect on the transparency of regional financial management. 3) Internal control has no positive and significant effect on the transparency of regional financial management.

Keywords : *Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements, Internal Control.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	
JUDUL PENELITIAN	ij
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Kontingensi.....	8
2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	9
3. Penyajian Laporan Keuangan Daerah	11
4. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	13
5. Pengendalian Internal.....	15
B. Tinjauan Empiris.....	17
C. Kerangka Pikir.....	27
D. Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29

C.	Jenis Sumber Data.....	30
D.	Populasi Dan Sampel.....	30
E.	Metode Pengumpulan Data.....	31
F.	Definisi Oprasional Variabel	31
G.	Metode Analisis Data.....	33
H.	Uji Hipotesis	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
B.	Hasil Penelitian	41
C.	Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....		59
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....		62
<u>LAMPIRAN</u>		



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Descriptive Statistics	41
Tabel 4.2 Hasil Uji Validasi Penyajian Laporan Keuangan.....	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Validasi Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	43
Tabel 4.4 Hasil Uji ValidasiPengendalian Internal.....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Validasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Realibilitas.....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas.....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R2).....	51
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4.1 Struktur organisasi BKAD Kabupaten Luwu Timur	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan transparansi dalam system Pemerintahan semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini terutama disebabkan oleh ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang ini memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (BAPPENAS RI, 2020).

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Akan tetapi, upaya perbaikan penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah (Aliyah, Siti; Nahar, 2012).

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, terutama terhadap perwujudan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Sari, 2012).

Pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan dana publik yang didasarkan pada konsep dasar performance budgeting system (anggaran kinerja). Selama ini terjadi di setiap daerah, dalam proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan anggaran yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kumpulan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, umumnya perhatian DPRD lebih terfokus pada besarnya anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah daerah harus memaksimalkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan untuk optimalisasi anggaran. Dalam hal ini semua aspek dari struktur aparatur daerah harus disusun dan berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, dalam era otonomi daerah sekarang ini, beberapa wilayah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya antara lain untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (Muchran et al., 2021).

Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang standar akuntansi pemerintahan, melalui PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan

pelaporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diharapkan lebih sistematis menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik sebagai salah satu agenda reformasi keuangan di Indonesia, serta tantangan di era globalisasi sekarang ini yaitu adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya akuntansi pemerintahan. Namun adopsi basis akrual ini, sepertinya tidak memperhatikan kondisi kualitas pengelolaan keuangan dan lingkungan pemerintahan di Indonesia sekarang ini, khususnya pemerintah daerah (BPK, 2010).

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang aktivitasnya memberikan pelayanan kepada publik, di mana visinya adalah Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021. Salah satu misinya adalah mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini dilihat bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 4 tahun terakhir masih rendah dengan penilaian C atau agak kurang khususnya untuk tahun 2015 dan 2016, sedangkan penggunaan anggaran pada tahun 2017 dan 2018 dengan penilaian CC atau cukup baik, namun hal ini tidak seimbang dengan capaian kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur (Achmad et al., 2021).

Teori kontingensi banyak digunakan dalam berbagai riset Akuntansi Menejemen berbasis perilaku. Konsep kontinjensi yang dikemukakan oleh

(Otley, 2016), yang mengklaim bahwa tidak ada cara yang terbaik dalam mengatur dan memimpin perusahaan dengan cara menganalisis faktor-faktor eksternal, faktor tipologi, struktur organisasi maupun struktur pengendalian dan faktor teknologi dalam perusahaan. Banyak studi studi perilaku organisasi yang menggunakan teori kontingensi dalam sistem pengendalian maupun pengukuran kinerja organisasi. Faktor lingkungan eksternal di ukur dengan peta persaingan perusahaan yang merupakan salah satu indikator dari lingkungan luar perusahaan dan cukup penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Teori kontingensi menyarankan bahwa perusahaan akan menuju ke arah yang lebih baik jika organisasi menerapkan sistem pengendalian Akuntansi manajemen yang cocok dengan budaya organisasi, lingkungan eksternal, maupun faktor organisasi lainnya (Ikbal et al., 2022). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan hasil antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, sehingga disimpulkan terdapat variabel lain yang mempengaruhinya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Hastuti, 2015) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah di kabupaten Boyolali, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012) yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jepara, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini ditambahkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah

berbasis aktual. Dalam penelitian ini juga menggunakan populasi, sampel dan waktu penelitian yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, pengendalian internal, berpengaruh secara simultan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu timur?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu timur?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah

2. Untuk mengetahui apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah
3. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah ditemukan pada rumusan masalah, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini agar dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan, khususnya pada bidang manajemen keuangan dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menambah informasi dalam pengambilan kebijakan bagi para pengambil keputusan terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan di perlukan di bidang yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Kontingensi

Teori kontingensi adalah sebuah pendapat bahwa perusahaan bisa mencapai kinerja terbaik pada saat struktur perusahaan relevan dan mampu menangani kontingensi yang diberlakukan berdasarkan ukuran, teknologi, dan lingkungannya. Teori ini punya tujuan untuk dapat memahami bagaimana perusahaan menyalurkan harapan perusahaan dengan kinerja nyata dengan memperhatikan lingkungan bisnis internal dan eksternalnya.

Teori kontingensi ini memandang bahwa lingkungan eksternal adalah factor utama yang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Teori ini menekankan pada pertanyaan tentang apakah dan dimana variable kontingensi berkontribusi pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya perlu memperoleh dan mengembangkan sumber daya mereka, tetapi juga perlu meningkatkan kemampuan dan menghadapi turbulensi lingkungan, supaya dapat terus beradaptas dengan lingkungan sebaik mungkin (Pratono, Strategic orientation and information technological turbulence: contingency, 2016). Teori kontingensi juga menyebutkan bahwa kehadiran ikatan jaringan saja tidak cukup untuk peningkatan kinerja; sebaliknya, ikatan jaringan perlu digabungkan dengan sumber daya yang dimiliki (Peng & Turel, 2020).

Faktor kontingensi juga sangat berguna pada pengenalan teknologi digital baru ke dalam sistem dengan kompleksitas tinggi (Tortorella, Fogliatto, & Vassolo, 2020). Variabel moderasi dari teori ini salah satunya adalah teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, kinerja perusahaan akan dapat mengkoordinasikan seluruh struktur organisasi dan secara tidak langsung akan memiliki strategi dalam mengolahnya. Dengan adanya teknologi informasi, banyak perusahaan termasuk UKM, dapat lebih mudah dalam pengerjaan bisnisnya. Perusahaan dan UKM dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan pelanggan sehingga bisa melihat pasar baru untuk peluang keuntungan yang lebih besar. Dengan adanya teknologi informasi, akan meningkatkan industri dan menyediakan produk substitusi yang bervariasi (Pratono, Strategic orientation and information technological turbulence: contingency, 2016) (Kosanke, 2019).

2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut (Sri Ayem 2017) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Halim & Darmayanti (2017;33) transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu.

Araujo dan Tejedro-Romero (2016) menjelaskan bahwa transparansi adalah sebuah konsep yang luas berhubungan dengan ketersediaan informasi, dapat diakses, dan digunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Toni Nurhadianto & Nur Khamisah 2019).

Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government Governance*). Selain itu, transparansi juga berperan alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah. Dalam rangka mewujudkan *good governance* tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pada dasarnya penerapan prinsip transparansi (Ledo & Ayem, 2017).

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pasal 1 ayat (8) menjelaskan Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. (Elsje Celvia Mongisidi & Rosalina A.M Koleangan & Debby. Ch. Rotinsulu 2019) menjelaskan ada 5 prinsip dalam pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah:

1. Akuntabilitas
2. *Value for money*
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan public (*Probity*)
4. Transparansi
5. Pengendalian.

3. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2015). Informasi dari laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh pihak manajemen maupun pihak eksternal serta untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kinerja perusahaan (Nasrullah, 2023).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Komponen pelaporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan.

4. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aliyah dan Nahar (2012), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Menurut Mardiasmo (2017;171), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publikasi informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability dan stewardship) (Hehanussa, 2015).

(Fauziah & Handayani, 2017) Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi:

1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan
2. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

3. *Accesible*, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

5. Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission* (Dewi, 2017) adalah proses, dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian sasaran dalam kategori berikut:

- 1) Efektivitas dan efisiensi operasi.
- 2) Tingkat keandalan pelaporan keuangan.
- 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang

reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Arens, 2012).

Adapun Komponen-komponen dalam pengendalian yaitu:

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) Sawyer 2012*) pengendalian internal satuan usaha terdiri atas komponen-komponen berikut:

a. Lingkungan pengendalian

Inti suatu bisnis adalah orang-orangnya dengan karakteristiknya termasuk integritas, nilai-nilai, etika dan lingkungan tempat mereka bekerja. Hal-hal tersebut merupakan mesin penggerak perusahaan dan merupakan fondasi segala sesuatunya ditempatkan.

b. Penaksiran risiko

Perusahaan harus mewaspadaai dan mengelola risiko yang dihadapinya. Perusahaan harus menetapkan tujuan yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan aktivitas-aktivitas lainnya sehingga organisasi beroperasi secara harmonis. Perusahaan juga harus menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko terkait.

c. Informasi dan komunikasi

Disekitar aktivitas-aktivitas ini terdapat sistem informasi dan komunikasi. Hal ini memungkinkan karyawan perusahaan mendapatkan dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

d. Aktifitas pengendalian

Kebijakan dan prosedur kontrol harus ditetapkan dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diidentifikasi oleh manajemen diperlukan untuk menghadapi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas secara efektif dilakukan.

e. Pemantauan

Keseluruhan proses harus dimonitor dan dibuat perubahan bila diperlukan. Dengan cara ini, sistem dapat bereaksi secara dinamis berubah seiring dengan perubahan kondisi. Pemantauan dilakukan disetiap kegiatan operasional perusahaan (Dewi, 2017).

B. Tinjauan Empiris

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA / TAHUN	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	ALAT ANALISIS PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	(Ledo & Ayam, 2017)	Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan DAERAH (X2), Pengendalian Internal (X3), Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X4), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (X5) Transparansi	Metode Analisis Data Dalam Penelitian Ini Adalah Menggunakan Software Statistical Package For Social Sciences (SSPS) Versi 17. Data Yang Diperoleh Dari Penyebaran	Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Secara Simultan Berpengaruh

			pengelolaan keuangan daerah (Y).		Positif Dan Signifikan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2.	(Surjono & Firdaus, 2017)	<p>Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung</p>	<p>Antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Variabel X) Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (Variabel Y).</p>	<p>Penelitian Menggunakan Metode Deskriptif Dengan Pendekatan Kuantitatif. Teknik Analisis Data Yang Digunakan Korelasi Regresi Sederhana, Analisis Koefisien Determinasi Dan Uji T-Student. Hasil Penelitian Menggambarkan Bahwa Koefisien Korelasi Adalah Sebesar 0,738, Yang Berarti Terdapat</p>	<p>Hasil Penelitian Menggambarkan Bahwa Koefisien Korelasi Adalah Sebesar 0,738, Yang Berarti Terdapat Arah Positif Dan Tingkat Pengaruh Yang Kuat Antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. Koefisien Determinasi (Kd) Adalah Sebesar 0,5446 Atau 54,46%, Hal Ini Dapat Diartikan Bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Sebesar 54,46%, Dan Sisanya Sebesar</p>

					45,54% Dipengaruhi Oleh Faktor- Faktor Lain.
3.	(Afriady, 2022)	Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, penghargaan, sanksi dan religiusitas terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (survei pada organisasi perangkat daerah kota serang)	Anggaran berbasis kinerja (X1), reward (X2), punishment (X3, religiusitas (X4), Kinerja instansi pemerintah daerah (Y)	Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, reward, punishment dan religiusitas memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Implikasi atas penelitian ini adalah Pemerintah Kota Serang dapat meningkatkan kualitas anggaran berbasis kinerja, kesesuaian realisasi anggaran dengan tujuan, serta diperlukan penerapan reward, kegiatan religiusitas dan peningkatan program pelatihan bagi pegawai.
4.	(Artini & Putra, 2020)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas	Penyajian laporan keuangan daerah (X1), aksesibilitas laporan	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan untuk	Hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda

		laporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten klungkung)	keuangan (X2) dan sistem pengendalian intern (X3), akuntabilitas laporan keuangan daerah (Y)	menguji kualitas data digunakan uji validitas dan uji reliabilitas	menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung.
5.	(Achmad et al., 2021)	Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Timur	Variabel Independen Dalam Penelitian Ini Adalah Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3), Sedangkan Variabel Dependen Adalah Variabel Yang Dipengaruhi Oleh Variabel Independen Yaitu Kinerja Anggaran Dianggap Sebagai Variabel Terikat (Y).	Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Kuantitatif, Teknik Pengumpulan Data Melalui Penyebaran Kuesioner. Sedangkan Teknik Analisis Data Menggunakan Analisis Deskriptif, Uji Kualitas Data (Uji Validitas Dan Reliabilitas), Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji Hipotesis Serta	Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji Hipotesis Serta Koefisien Determinasi. Hasil Penelitian Menemukan Bahwa Akuntabilitas Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Transparansi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Kantor Pemerintah Daerah

				Koefisien Determinasi. Hasil Penelitian Menemukan Bahwa Akuntabilitas	Kabupaten Luwu Timur. Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dari Hasil Pengujian Regresi Maka Diketahui Bahwa Variabel Yang Dominan
6.	(Rachmad , 2021)	Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.	Transparansi Pengelolaan Keuangan Variabel (Y), Aspek Manajemen Keuangan Variabel (X) Parameter Regresi Variabel (X1), Aspek Perencanaan Variabel (X2), Aspek Pelaksanaan (X3), Aspek Pelaporan (X4), Pengawasan.	Penelitian ini menggunakan Regresi Linear Sederhana berganda dengan data primer diperoleh menggunakan kuesioner.	Hasil Penelitian Menjelaskan Bahwa Secara Parsial Aspek Perencanaan Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Aspek Pelaporan, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lumajang. Secara Simultan Aspek Perencanaan Keuangan

					Daerah, Aspek Penatausahaan Keuangan Daerah, Aspek Pelaporan Dan Aspek Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lumajang
7.	(Anwar & Mane, 2022)	Analisis Implementasi Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Asn Melalui Kepuasan Kerja Pada Badan Pengelolan Keuangan Daerah (Bpkd) Kabupaten Luwu Timur	Analisis Implementasi Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan (X1) Dan Kedisiplinan (X2) Terhadap Kinerja ASN (Y) Melalui Kepuasan Kerja (Z).	Jenis Penelitian Ini Adalah Menggunakan Pendekatan Kuantitatif Yaitu Penelitian Yang Menekankan Pada Pengujian Teori-Teori Melalui Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian Dengan Melakukan Analisis Data Dengan Prosedur Statistik. Adapun Metode Yang Digunakan Pada	Hasil Penelitian Menemukan Bahwa A) Sistem Pemberian TPP Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepuasan Kerja, B) Kedisiplinan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepuasan Kerja, C) Sistem Pemberian TPP Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja ASN, D) Kedisiplinan Ber-Pengaruh Positif Dan

				<p>Penelitian Ini Adalah Metode Survey Yang Bertujuan Untuk Mengumpulkan Data Dalam Rangka Menguji Hubungan-Hubungan Variabel Yang Terlebih Dahulu Dihipotesiskan Dan Menggunakan Kuisisioner Sebagai Alat Pengumpulan Data Yang Pokok.</p>	<p>Signifikan Terhadap Kinerja ASN,</p> <p>E)Kepuasan Kerja Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja ASN,</p> <p>F)Kepuasan Kerja Dapat Memediasi Pengaruh Sistem Pemberian TPP, Serta</p> <p>G)Kepuasan Kerja Dapat Memediasi Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Kinerja ASN Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.</p>
8.	(Defitri, 2022)	<p>Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.</p>	<p>Kinerja Pemerintah Daerah (Y), Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3).</p>	<p>Jenis Penelitian Yang Dilakukan</p> <p>Adalah Jenis Penelitian Kuantitatif Dengan Pendekatan Asosiatif. Sumber Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Data Primer,</p>	<p>Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah</p>

				Yaitu Data Yang Diperoleh Menggunakan Instrumen Kuesioner.	Daerah, Sedangkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Kemudian Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
9.	(Oktavia & Aliyah, 2022)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah	Teknik eksternal (X1), ketidakpastian lingkungan (X2), komitmen manajemen (X3), akuntabilitas (X4), tingkat pengungkapan laporan keuangan (X5), system pengendalian intern pemerintah	Dengan Metode Purposive Sampling, Analisis Data Menggunakan Analisis Regresi Berganda.	Analisis Data Menggunakan Analisis Regresi Berganda. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Akuntabilitas, Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, Sistem

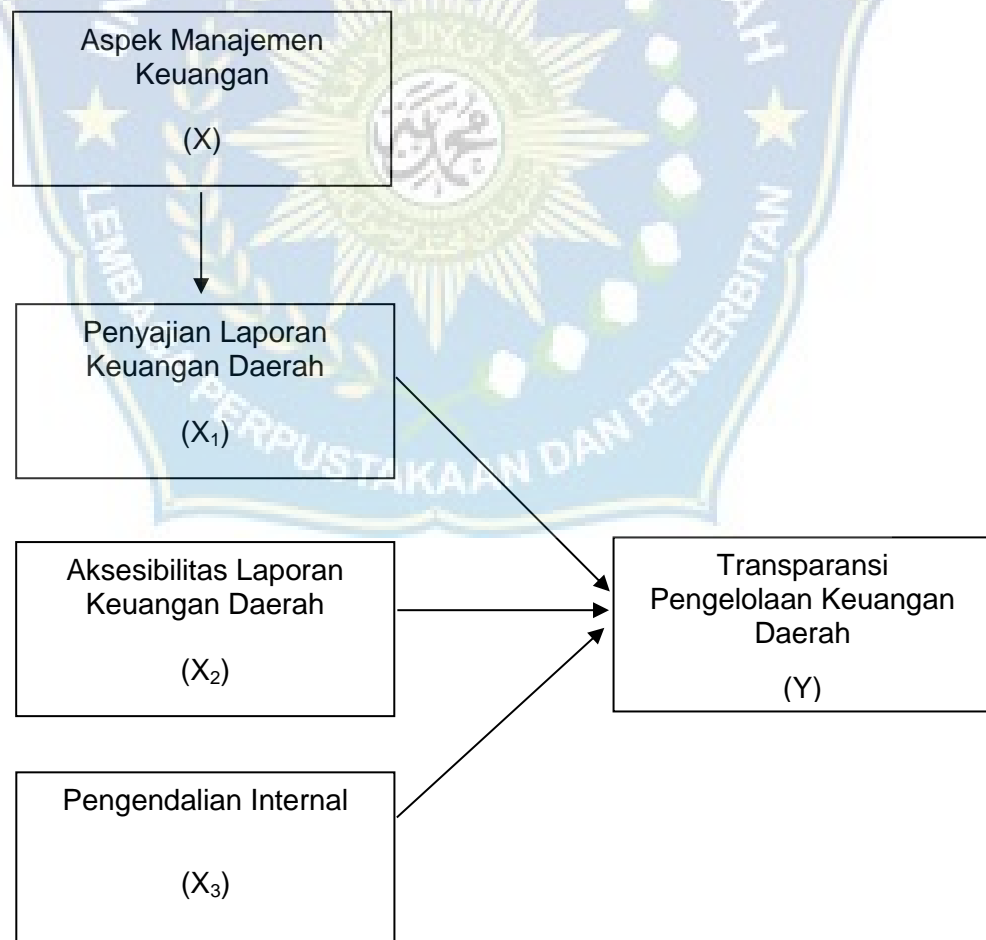
			(X6), factor politik (X7), kompetensi sumber daya manusia (X8), penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah (Y)		Pengendalian Intern Pemerintah, Faktor Politik, Kompetensi Sumber Daya Manusia Tidak Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Sedangkan Ketidakpastian Lingkungan Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.
10.	(Kurniawan & Rahayu, 2019)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian laporan keuangan (X1), Aksesibilitas laporan keuangan (X2), Akuntabilitas pengelolaan keuangan (y)	Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 25	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif, dan aksesibilitas

					<p>laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain untuk meneliti pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagi Sekretariat Daerah Kota Mataram juga diharapkan untuk dapat menambah sumber daya agar mempermudah dalam melakukan penyajian laporan keuangan dan menambah informasi – informasi keuangan melalui internet (website) agar mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan sangat</p>
--	--	--	--	--	--

					baik
--	--	--	--	--	------

C. Kerangka Pikir

Teori yang telah dikemukakan diatas, gambaran menyeluruh penelitian ini yang menyangkut tentang pengaruh aspek manajemen keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur. Dapat disederhanakan dalam kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar landasan teori, kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah maka hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur.
- H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur.
- H3: Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah kuantitatif, Menurut sugiyono (2019), metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengetahui pengaruh aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan data informasi dan fenomena yang terjadi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, Jln Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

2. Waktu

Waktu penelitian yang telah dilaksanakan selama 2 bulan yakni pada bulan Maret sampai dengan April 2023.

C. Jenis Sumber Data

1. Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah merupakan hasil dari tanggapan responden melalui penyebaran kuesioner terhadap variabel-variabel penelitian yang akan diuji dengan menggunakan sistem komputerisasi melalui program SPSS.
2. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh melalui perantara. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber lainnya, yang berkaitan dengan topik yang diangkat pada penelitian ini, yang dibutuhkan untuk mendukung variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017) dalam (Susanto, 2019).

Berdasarkan pengertian serta judul penelitian, maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pegawai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017) teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau

kriteria-kriteria tertentu (Seviani & Budiwinarto, 2021). Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh staf/pegawai di kantor BKAD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 38 pegawai.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian perlu ditentukan Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dengan penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

1. Kuesioner/ Angket merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada para responden untuk dijawab.
2. Observasi/ pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat langsung dilokasi penelitian tersebut berada.
3. Studi dokumen yaitu melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang diberikan berupa laporan-laporan keuangan daerah, dan dokumen profil instansi untuk memahami tugas dan tanggungjawab instansi.

F. Definisi Oprasional Variabel

1. Variabel Terikat (*Dependence Variabel*)

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah selaku pengelolaan keuangan dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya (Mardiasmo 2017).

- a. Adanya akses pelaporan keuangan
- b. Adanya sistem pengukuran pengelolaan
- c. Diberlakukannya transparansi penunjang kinerja pengelolaan
- d. Berfungsinya penyediaan informasi yang akurat

2. Variabel Bebas (*Independen Variabel*)

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penyajian laporan keuangan daerah

Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik (Aliyah dan Nahar, 2012).

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dipahami

- b. Aksesibilitas laporan keuangan daerah

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporannya dapat dilakukan antara lain dengan

cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Hehanussa, 2012).

1. Seluruh stakeholder memiliki akses terhadap laporan keuangan.
2. Ketersediaan informasi saat dibutuhkan.
3. Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses.

c. Pengendalian internal

Organisasi memiliki kode etik, staf yang kompeten, dapat dipercaya, dan tanggap dengan perubahan, tugas dan jabatan terstruktur, kebijakan pemisahan tugas, pemeriksaan independen, sistem informasi yang baik, pengawasan secara terus menerus dan periodik, pengendalian internal yang tinggi terhadap pegawai maka akan meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah (Hastuti, 2015).

1. Menunjukkan komitmen terhadap nilai etika
2. Adanya pemahaman mengenai komitmen integritas
3. Mampu menetapkan struktur yang tepat dalam pencapaian tujuan
4. Seluruh karyawan memahami pengendalian internal.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan *software Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*. Data yang

diperoleh dari penyebaran kuesioner akan diolah melalui beberapa tahap pengujian yang terdiri dari:

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2015;52) Pengujian ini menggunakan metode *Korelasi Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) yaitu untuk membuktikan keberadaan hubungan antara dua variabel.

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas ini menggunakan Teknik *Cronbach's alpha* (α). Kriteria suatu instrument penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan Teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r_i) $> 0,6$ (Ghozali, 2011;48).

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independent (*Explanatory*) terhadap satu variabel dependen. Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

α : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: koefisien regresi

X_1 : Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X_2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

X_3 : Pengendalian Internal

e : Variabel pengganggu/eror

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independent dan dependen keduanya memiliki distribusi normal (Ghozali,2011;160). Untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistic yaitu *Kolmogrof-Smirnov test*. Jika nilai signifikan dari pengujian *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* $> 0,05$ maka data mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011;164).

b. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Deteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation factor*) dan tolerance $\leq 0,10$ (Ghozali,2011;106).

H. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011;97).

b. Uji Statistik t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau signifikansi 5% ($=0,05$). Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, jika t hitung besar tabel maka H_0 tidak terdukung dan H_a terdukung demikian juga sebaliknya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Sejarah Singkat

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan penata usahaan pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah atau semua hak dan kewajiban daerah dalam perangkat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam tata kelola keuangan daerah pemerintahan Kab. Lutim melalui BKAD bertugas dalam mengelolah keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pertanggung jawaban sampai dengan pelaporan dan menejemen aset daerah.

Pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur. dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksanaan dari

desentralisasi fiskal. Sedangkan fungsi Badan Keuangan dan Aset daerah adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BKAD dalam sejarahnya didahului dengan bagian keuangan pada tahun 2004 yang bergabung pada sekretariat daerah. Pada awalnya bagian keuangan terdiri dari sub bagian anggaran, sub bagian perbendaharaan, sub bagian verifikasi dan pertanggungjawaban. Pada tahun 2009 bagian keuangan pada sekretariat daerah bergabung dengan, bagian asset dan dinas pendapatan daerah menjadi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset daerah (BPPKAD) yang terdiri dari sekretariat, bidang pendapatan, bidang anggaran, bidang akuntansi, dan bidang asset.

Pada tahun 2017 bppkad berganti nama menjadi Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKAD) YANG TERDIRI dari sekretariat, bidang pendataan dan penetapan pajak daerah,

bidang penagihan, bidang anggaran, bidang akuntansi, dan bidang asset.

Pada tahun 2022 bidang pendapatan berpisah dari BPKAD menjadi BPD sedangkan BPKAD berubah menjadi badan keuangan dan aset daerah (BKAD) yang terdiri dari secretariat, bidang perencanaan daerah, bidang akuntansi, bidang asset dan bidang anggaran.

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang kini terbagi menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berlokasi di Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

2. Visi dan Misi

Dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, badan keuangan dan aset daerah (BKAD) menentukan sebuah rencana strategis sebagai berikut:

a) Visi

Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya.

b) Misi

Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik.

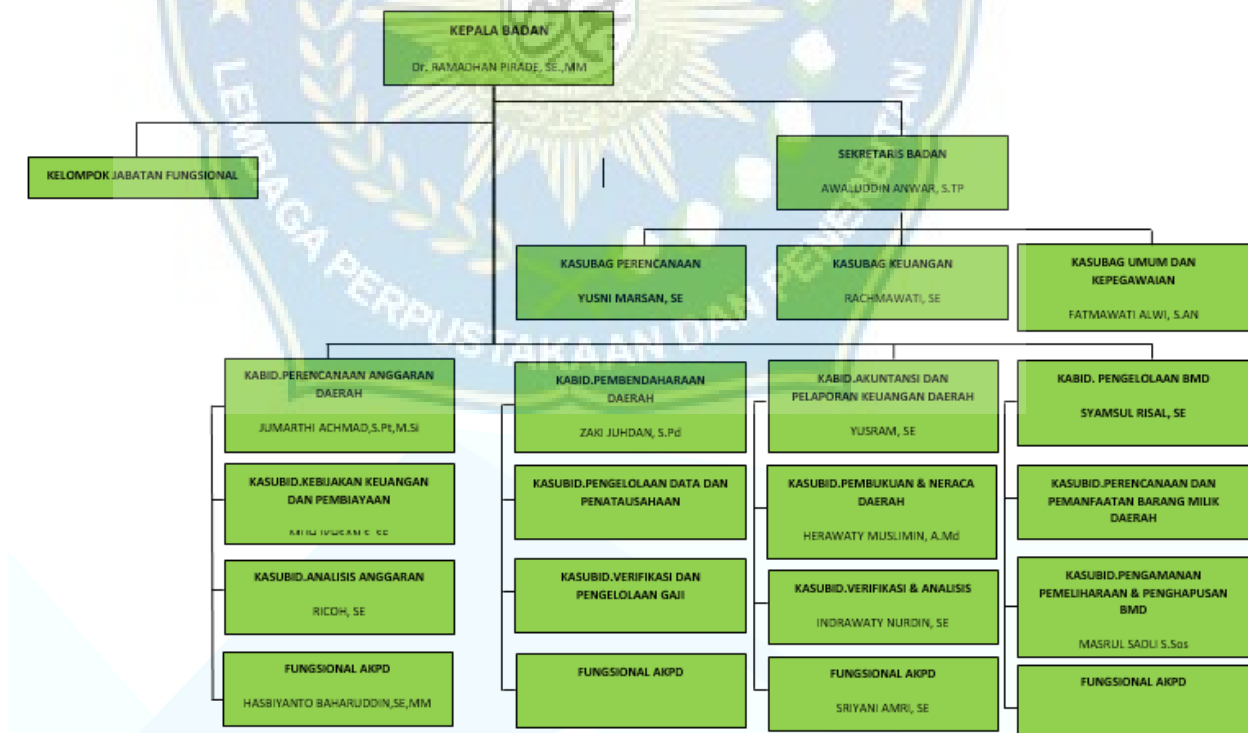
3. Struktur Organisasi

Menurut Robbins dan Coulter (2007;284), bisa diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Pada umumnya, setiap perusahaan atau organisasi memiliki susunan

struktur organisasi. Pembentukan struktur organisasi adalah Langkah awal untuk menjalankan aktivitas organisasi atau rancangan suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarah dan pengawasan.

Pengertian struktur organisasi secara umum adalah suatu susunan dari berbagai komponen atau unit kerja dalam organisasi didalam masyarakat atau perusahaan. Agar lebih jelas, maka dibawah ini disajikan struktur organisasi yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur organisasi BKAD Kabupaten Luwu Timur



B. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Statistik dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian antara mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	38	18.00	35.00	27.2368	3.54457
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN	38	38.00	49.00	44.4211	2.58511
PENGENDALIAN INTERNAL	38	46.00	59.00	52.4474	3.35871
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	38	31.00	40.00	35.5526	2.17725
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Data diolah SPSS versi 24

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validasi

1) Uji Validasi Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Perhitungan uji validitas dilakukan dengan program SPSS yang dimana dikatakan memiliki nilai validitas tinggi jika nilai r hitung $\geq r$ tabel begitupun sebaliknya, dikatakan memiliki nilai validitas rendah jika nilai r hitung $\leq r$ tabel.

Tabel 4.2 Hasil Uji Validasi Penyajian Laporan Keuangan

Variabel	Nilai r Tabel	Nilai r Hitung	Keterangan
X1.1	0,320	.586	Valid
X1.2	0,320	.598	Valid
X1.3	0,320	.504	Valid
X1.4	0,320	.577	Valid
X1.5	0,320	.585	Valid
X1.6	0,320	.808	Valid
X1.7	0,320	.640	Valid

Sumber : Data diolah SPSS Versi 24

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan pada variabel penelitian mengenai Penyajian Laporan Keuangan Daerah dikatakan valid karena nilai r hitung $>$ nilai r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,320, sedangkan nilai r hitung untuk X1.1 sebesar 0,586, X1.2 sebesar 0,598, X1.3 sebesar 0,504, X1.4 sebesar 0,577, X1.5 sebesar 0,585, dan X1.6 sebesar 0,808, X1.7 sebesar 0,640.

2) Uji Validasi Aksesibilitas Laporan Keuangan

Tabel 4.3 Hasil Uji Validasi Aksesibilitas Laporan Keuangan

Variabel	Nilai r Tabel	Nilai r Hitung	Keterangan
X2.1	0,320	.578	Valid
X2.2	0,320	.409	Valid
X2.3	0,320	.563	Valid
X2.4	0,320	.437	Valid
X2.5	0,320	.394	Valid
X2.6	0,320	.557	Valid
X2.7	0,320	.578	Valid
X2.8	0,320	.489	Valid
X2.9	0,320	.557	Valid
X2.10	0,320	.563	Valid

Sumber : Data diolah SPSS Versi 24

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan pada variabel penelitian mengenai Aksesibilitas Laporan Keuangan dikatakan valid karena nilai r hitung > nilai r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,320, sedangkan nilai r hitung untuk X2.1 sebesar 0,578, X2.2 sebesar 0,409, X2.3 sebesar 0,563, X2.4 sebesar 0,437, X2.5 sebesar 0,394, X2.6 sebesar 0,557, X2.7 sebesar 0,578, X2.8 sebesar 0,489, X2.9 sebesar 0,557, X2.10 sebesar 0,563.

3) Uji Validasi Pengendalian Internal

Tabel 4.4 Hasil Uji Validasi Pengendalian internal

Variabel	Nilai r Tabel	Nilai r Hitung	Keterangan
X3.1	0,320	. 329	Valid
X3.2	0,320	. 603	Valid
X3.3	0,320	. 600	Valid
X3.4	0,320	.522	Valid
X3.5	0,320	.454	Valid
X3.6	0,320	. 522	Valid
X3.7	0,320	.528	Valid
X3.8	0,320	.441	Valid
X3.9	0,320	.605	Valid
X3.10	0,320	.754	Valid
X3.11	0,320	.560	Valid
X3.12	0,320	.502	Valid

Sumber : Data diolah SPSS Versi 24

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan pada variabel penelitian mengenai Pengendalian Internal dikatakan valid karena nilai r hitung > nilai r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,320. Sedangkan nilai r hitung untuk X3.1 sebesar 0,329, X3.2 sebesar 0,603, X3.3 sebesar 0,600, X3.4 sebesar 0,522, X3.5 sebesar 0,454, X3.6 sebesar 0,522, X3.7 sebesar 0,528, X3.8 sebesar 0,441, X3.9 sebesar 0,605, X3.10 sebesar 0,754, X3.11 sebesar 0,560, X3.12 sebesar 0,502.

4) Uji Validitas Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

**Tabel 4.5 Hasil Uji Validasi Transparansi Pengelolaan
Keuangan Daerah**

Variabel	Nilai r Tabel	Nilai r Hitung	Keterangan
Y.1	0,320	.664	Valid
Y.2	0,320	.489	Valid
Y.3	0,320	.685	Valid
Y.4	0,320	.335	Valid
Y.5	0,320	.458	Valid
Y.6	0,320	.418	Valid
Y.7	0,320	.443	Valid
Y.8	0,320	.717	Valid

Sumber : Data diolah SPSS Versi 24

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan pada variabel penelitian mengenai Penyajian Laporan Keuangan Daerah dikatakan valid karena nilai r hitung > nilai r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,320, sedangkan nilai r hitung untuk Y.1 sebesar 0,664, Y.2 sebesar 0,489, Y.3 sebesar 0,685, Y.4 sebesar 0,335, Y.5 sebesar 0,458, dan Y.6 sebesar 0,418, Y.7 sebesar 0,443, Y.8 sebesar 0,717.

b. Uji Realibilitas

Perhitungan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS yang dimana nilai reliabilitas cronbach alpha $\geq 0,60$ sehingga dikatakan reliabel.

Tabel 4.6 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbanch Alpha	Tingkat Signifikan	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0.722	0,60	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0.685	0,60	Reliabel
Pengendalian Internal	0.766	0,60	Relibael
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	0,633	0,60	Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS Versi 24

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa, nilai cronbanch's alpha yang pada Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) sebesar 0,722, Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) sebesar 0,685, Variabel Pengendalian Internal (X3) sebesar 0,766, dan Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,633.

Berdasarkan pengambilan keputusan maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1), variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), Variabel Pengendalian Internal (X3), dan Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dikatakan Reliabel karna memenuhi syarat pengambilan keputusan nilai cronbach alpha diatas 0,6.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan Test Normality *Kolmogorov-Smimov*, dengan dasar pengambilan keputusannya yaitu:

- 1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi

adalah normal.

- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.10429010
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.077
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah SPSS versi 24

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi Normal atau telah memenuhi syarat pengambilan keputusan dari uji normalitas menggunakan pengujian statistic *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

b. Uji Multikolonieritas

Dalam analisis regresi, suatu model harus terbebas dari gejala multikolinieritas. Pendugaan tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadi adanya hubungan yang linier diantara variable.

- 1) Jika nilai VIF ≥ 10 maka ada gejala multikolinieritas. Jika nilai VIF ≤ 10 maka tidak ada gejala multikolinieritas.
- 2) Jika nilai tolerance $< 0,10$ maka ada gejala multikolinieritas. Jika nilai tolerance $> 0,10$ maka tidak ada gejala multikolinieritas.

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Nilai VIF	Nilai Tolerance
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	1.000 < 10,00	1.000 > 0,10
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	1.247 < 10,00	.802 > 0,10
Pengendalian Internal (X3)	1,247 < 10,00	.802 > 0,10

Sumber : Data diolah SPSS Versi 24

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai VIF sebesar 1.000 untuk variable Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal kurang dari 10,00, dan nilai tolerance untuk variable X1, X2 dan X3 sebesar 1.000, .802 lebih

besar dari 0,10, sehingga ditarik kesimpulan variable Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresinya.

4. Uji Analisis regresi linier berganda

Analisis linier regresi berganda merupakan analisis regresi linier yang melibatkan atau menghubungkan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.772	3.936		.450	.655
	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	.023	.053	.037	2.107	.045
	AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN	.172	.082	.204	2.104	.043
	PENGENDALIAN INTERNAL	.486	.063	.750	7.727	.000

a. Dependent Variable: TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sumber : Data diolah SPSS Versi 24

Pada tabel 4.9 menunjukkan persamaan regresi linear berganda berikut ini :

$$Y = 1.772 + 0,23X_1 + 0,172X_2 + 0,486X_3$$

- 1.) (a) Konstanta sebesar 1.772, yang artinya jika Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) dan Pengendalian Internal (X3) atau Konstanta $X=0$ maka nilai a konstanta sebesar 1.772
- 2.) (b₁) Koefisien Penyajian Laporan Keuangan (X1) sebesar 0,023, artinya jika Penyajian Laporan Keuangan mengalami peningkatan sebanyak 1%, maka variable Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,023, dan bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif antara variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).
- 3.) (b₂) Koefisien Regresi Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) sebesar 0.172 artinya jika Aksesibilitas Laporan Keuangan meningkat 1%, maka variable Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,172 dan bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif antara variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) dan Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).
- 4.) (b₃) Koefisien Regresi Variabel Pengendalian Internal (X3) sebesar 0.486 artinya jika Pengendalian Internal meningkat 1%, maka variable Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,486 dan bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif antara variabel Pengendalian Internal (X3) dan Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).



5. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011;97). Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862 ^a	.743	.720	1.15198

a. Predictors: (Constant), PENGENDALIAN INTERNAL, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN

Sumber : Data diolah SPSS versi 24

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,720 artinya besarnya pengaruh dari penyajian laporan Keuangan Daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, pengendalian internal, sebesar 50% sisanya sebesar 50% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 tidak terdukung dan H_a terdukung demikian juga sebaliknya.

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.772	3.936		.450	.655
	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	.023	.053	.037	2.107	.045
	AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN	.172	.082	.204	2.104	.043
	PENGENDALIAN INTERNAL	.486	.063	.750	7.727	.000

a. Dependent Variable: TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sumber : Data diolah SPSS versi 24

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai t hitung pada variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) sebesar 2.107 $>$ nilai t tabel yaitu 2.03224 dan nilai signifikansinya sebesar 0.045 $<$ 0.05, untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) nilai t hitung sebesar 2.104 $>$ nilai t tabel yaitu 2.03224 dan nilai signifikansinya sebesar 0.043 $<$ 0.05 sedangkan untuk variabel Pengendalian Internal (X3) memiliki nilai t

hitung sebesar $7.727 >$ nilai t tabel yaitu 2.03224 dan nilai signifikansinya sebesar $0.000 < 0.05$.

Berdasarkan pengambilan keputusan pada uji t disimpulkan bahwa Hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti diterima dalam artian pada variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), dan Hipotesis kedua diterima dalam artian pada variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), sedangkan Hipotesis ketiga diterima dalam artian pada variabel Pengendalian Internal (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

C. Pembahasan

Secara parsial penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Uji Parsial (Uji t), menunjukkan nilai t hitung pada variabel penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) sebesar $2.107 >$ nilai t tabel yaitu 2.03224 dan nilai signifikansinya sebesar $0.045 < 0.05$. Artinya variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) memiliki pengaruh

signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), sehingga mendukung perumusan hipotesis 1 yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori kontingensi, dengan adanya tuntutan dari pihak eksternal seperti pihak Investor maupun kreditor untuk tujuan pertumbuhan keuangan suatu instansi pemerintah sebagai bahan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dalam penyajian laporan keuangan yang diperoleh belum seagut dan selengkap mungkin sesuai standar akuntansi, agar mudah untuk dipahami oleh penggunanya.

Penelitian ini diindikasikan bahwa penyajian Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur melibatkan satuan kerja lain seperti yang telah dijelaskan pada teori kontingensi. Bagi Kabupaten Luwu Timur, penyajian laporan keuangan saat ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur karena juga diindikasikan adanya SDM dari unit lain selain yang berperan aktif dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dominikus Ledo & Sri Ayem (2017) yang hasilnya menunjukkan Penyajian Laporan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Uji Parsial (Uji t), menunjukkan nilai t hitung pada variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) sebesar $2.104 >$ nilai t tabel yaitu 2.03224 dan nilai signifikansinya sebesar $0.043 < 0.05$. Artinya variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), sehingga mendukung perumusan hipotesis 2 bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori kontingensi, aksesibilitas merupakan kemudahan dalam mengakses dan memperoleh informasi laporan keuangan yang dibuat oleh unit pemerintah sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan para pengguna informasi keuangan pemerintah

Penelitian ini diindikasikan bahwa aksesibilitas dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur seperti kemudahan para pegawai dalam mengakses laporan keuangan daerah sebagai salah satu bukti akan terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Siti Aliyah & Alda Nahar (2012) yang hasilnya menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap transparansi dan akuntabilitas peneglolaan keuangan daerah.

3. Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Uji Parsial (Uji t), menunjukkan nilai t hitung pada variabel Pengendalian Internal (X3) sebesar 7.727 > nilai t tabel yaitu 2.03224 dan nilai signifikansinya sebesar 0.000 < 0.05. Artinya variabel Pengendalian Internal (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), sehingga mendukung perumusan hipotesis 3 bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori kontingensi, Pengendalian Internal tergantung pada konteks organisasi di mana pengendalian tersebut dilaksanakan. Didalam kepentingan pemerintahan daerah, pengendalian internal dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh yang dilakukan oleh mentri, gubernur, dan bupati yang sifatnya wajib agar tercapai pengendalian internal yang bersifat transparansi.

Penelitian ini diindikasikan bahwa pengendalian internal yang diterapkan sudah baik, yang dimana Kabupaten Luwu Timur dalam meminimalkan segala hal dalam transparansi penyusunan laporan keuangan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan yang

secara langsung mempengaruhi transparansi Laporan Keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian menggunakan Uji Parsial (Uji t), Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dominikus Ledo & Sri Ayem (2012) yang hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada hasil penelitian ini berdasarkan hasil uji t yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan melakukan reformasi penyajian laporan keuangan dalam aspek karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu disajikan secara lengkap dan mencakup semua informasi yang dibutuhkan pengguna dan informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempublikasikan laporan keuangan dan memberikan kemudahan akses bagi pihak yang membutuhkan melalui media seperti surat kabar, majalah, dan internet.

2. Pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian internal dengan cara menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko secara efektif.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi saja tetapi juga yang lebih tinggi. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel dari pihak pengguna eksternal laporan keuangan daerah, tidak hanya pihak pengguna internal atau pihak penyaji laporan keuangan.





DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, J., Saleh, H., & Chahyono, C. (2021). Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Timur. *Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 105–111. <https://doi.org/10.35965/jbm.v2i2.405>
- Afriady. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Penghargaan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, 6(02), 181–193.
- Aliyah, Siti; Nahar, A. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Siti Aliyah Aida Nahar. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 97–189.
- Anwar, A., & Mane, A. (2022). 1490-Article Text-7204-1-10-20220731. 4(2), 110–121.
- Artini, N. L. W., & Putra, I. P. D. S. (2020). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 188–218.
- BAPPENAS RI. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 4–7.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Defitri, S. Y. (2022). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Opd Di Kota Solok). *Jurnal Ekonomia*, 12(1), 58–72.
- Dewi, S. P. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Spbu Yogyakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(9), 1689–1699.
- Fauziah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 53(9), 1689–1699.
- Hastuti, A. I. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Di Kabupaten Boyolali. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
- Hehanussa, S. J. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon Salomi*. 2, 82–90.

- Ikbal, M., Ekonomi, F., & Mulawarman, U. (2022). *Volume . 18 Issue 4 (2022) Pages 831-839 INOVASI: Jurnal Ekonomi , Keuangan dan Manajemen ISSN: 0216-7786 (Print) 2528-1097 (Online) Mengelola persaingan menuju pencapaian kinerja perusahaan perbankan yang berdaya saing Managing competition toward. 18(4), 831–839.*
- Kosanke, R. M. (2019). *Teori Kontingensi dan Efek Mediasi.*
- Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). The Effect Of The Presentation Of Financial Statment And Accessibility Financial Statment On Regional Financial Management Accountability (Case Study in Mataram City Regional Secre). *Management, 6(1), 705–714.*
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/8743>
- Ledo, D., & Ayem, S. (2017). Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha, 25(2), 161–175.*
<https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.236>
- Muchran, M., Winarsih, E., & (2021), H. (2021). *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. 04(02), 6.*
- Nasrullah. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan CAMEL. *4(1), 483-500.*
- Oktavia, windi tyas, & Aliyah, S. (2022). *Among Makarti Vol. 15 No. 2 (Edisi Khusus Dies Natalis ke-38) – Agustus 2022. 15(2), 215–232.*
- Rachmad, A. (2021). The Effect Of Regional Financial Management Aspects Transparency Of Regional Financial Management In Lumajang Ari Rachmad Perbanas Jakarta Email : ari.rachmad030@perbanas.id. *Ascarya, 1(1), 78–98.*
- Sari, D. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional, 718–727.*
- Seviani, P., & Budiwinarto, K. (2021). *Surakarta Accounting Review (SAREV). Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, 3(2), 89–100.*
- Surjono, W., & Firdaus, N. R. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah Pemerintahan Berbasis Akrual dilakukan dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akrual dan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 5(1), 1357–1368.*

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1

PEDOMAN KUESIONER PENELITIAN PENGARUH ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Assalamualaikum wr.wb.

Saya Syarah Monika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Prodi Manajemen. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir kuliah (skripsi). Bantuan Bapak/Ibu sangat di butuhkan untuk menjadi responden dalam penelitian saya, dengan mengisi angket atau kuesioner ini. Jawaban ataupun respon Bapak/Ibu tidak dilihat dari benar atau salahnya, dan kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu terjamin. Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu atas bantuannya karna telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi angket penelitian ini.

A. Identitas Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang paling sesuai di tempat yang tersedia.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
Laki-laki Perempuan
3. Usia :

< 20 Tahun		25-28 Tahun	
20-24 Tahun	<input type="checkbox"/>	29-32 Tahun	<input type="checkbox"/>
33-36 Tahun	<input type="checkbox"/>	> 41 Tahun	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		
37-40 Tahun			

4. Pendidikan Terakhir :

SMA	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>
S1	<input type="checkbox"/>	S2	<input type="checkbox"/>

5. Lama Bekerja :

< 1 Tahun	<input type="checkbox"/>	5-8 Tahun	<input type="checkbox"/>
1-4 Tahun	<input type="checkbox"/>	> 13 Tahun	<input type="checkbox"/>
9-12 Tahun	<input type="checkbox"/>		

B. Petunjuk Pengisian

1. Pilihlah jawaban yang Ibu/Bapak anggap paling sesuai dengan pendapat anda.
2. Pada jawaban yang sudah tersedia, berilah tanda (✓) untuk salah satu jawaban yang anda pilih.
3. Bila anda keliru dalam memberi tanda centang (✓), coretlah tanda centang tersebut, kemudian berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang sebenarnya Anda pilih.

4. Tidak ada jawaban anda yang salah sepanjang hal tersebut benar-benar sesuai dengan keadaan diri dan perasaan anda. Berilah tanda (✓) pada skala pengukuran yang tersedia

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (X1)

Berilah tanda (X) pada pernyataan dibawah ini dengan memilih skala nilai 1 sampai dengan 5 tentang penyajian laporan keuangan, dimana skala

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Ragu-ragu (RR)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

NO	PERNYATAAN	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Laporan keuangan BKAD Luwu Timur disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.					
2	Laporan keuangan BKAD Luwu Timur menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.					
3	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan BKAD Luwu Timur dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.					
4	Laporan Keuangan BKAD Luwu Timur memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.					
5	Laporan Keuangan BKAD Luwu Timur dapat membantu pengguna					

	memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.					
6	Laporan keuangan BKAD Luwu Timur selalu disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.					
7	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna. Sumber : Hanim (2009) dalam Atika Reski (2015)					

AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN (X2)

Berilah tanda (X) pada pernyataan dibawah ini dengan memilih skala nilai 1 sampai dengan 5 tentang aksesibilitas laporan keuangan, dimana skala

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Ragu-ragu (RR)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

NO	PERNYATAAN	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.					
2	Memberikan kemudahan kepada pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.					
3	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (<i>website</i>)					

4	Laporan Keuangan memuat informasi yang sudah seharusnya terpublikasikan.					
5	Laporan Keuangan dapat diakses dimanapun dan kapanpun					
6	Seluruh pengguna memiliki kemudahan yang sama dalam mengakses laporan keuangan.					
7	Laporan Keuangan Daerah tidak dapat diakses melalui media massa dan internet.					
8	Laporan Keuangan Daerah dapat di pahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah.					
9	Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.					
10	Adanya ruang akses masyarakat untuk memberikan saran, dan kritik atas hasil laporan keuangan. Sumber : Nasytion (2010) dalam Atika Rizki (2015)					

PENGENDALIAN INTERNAL (X3)

Berilah tanda (X) pada pernyataan dibawah ini dengan memilih skala nilai 1 sampai dengan 5 tentang pengendalian internal, dimana skala

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Ragu-ragu (RR)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

NO	PERNYATAAN	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Pegawai BKAD menunjukkan komitmen terhadap nilai etika.					
2	Pegawai BKAD menunjukkan komitmen terhadap integritas.					
3	Manajemen BKAD menetapkan struktur yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan.					
4	Setiap masing-masing karyawan memahami peran pengendalian internal.					
5	Karyawan ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya.					
6	Karyawan bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan oleh BKAD.					
7	Manajemen BKAD menetapkan kewenangan beserta tanggung jawab yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan.					
8	BKAD menunjukkan komitmen dalam proses rekrutmen karyawan yang kompeten sesuai tujuan perusahaan.					
9	BKAD menunjukkan komitmen untuk pengembangan karyawan yang kompeten sesuai dengan kebijakan kantor.					
10	Setiap karyawan memahami peran pengendalian internal masing-masing.					
11	BKAD menunjukkan komitmen untuk mempertahankan karyawan yang kompeten.					
12	Setiap karyawan memahami tanggung jawab pengendalian internal masing-masing.					
	Sumber : Nabila Ayulndria, 2018					

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Y)

Berilah tanda (X) pada pernyataan dibawah ini dengan memilih skala nilai 1 sampai dengan 5 tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah, dimana skala

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Ragu-ragu (RR)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

NO	PERNYATAAN	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh.					
2	Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi.					
3	Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan.					
4	Penyediaan informasi yang bertanggungjawab.					
5	Penyebarluasan Laporan Keuangan telah disampaikan melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.					
6	Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan.					
7	Ada ketersediaan system informasi manajemen dan monitoring hasil yang					

	telah dicapai.					
8	Penyampaian Laporan Keuangan telah melalui kerja sama dengan media massa dan Lembaga non pemerintahan. Sumber : Atika Riski, 2015)					



LAMPIRAN 2

TABULASI DATA

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	TOT AL
5	5	5	3	3	3	3	27
5	4	4	4	3	3	4	27
5	4	4	4	4	4	4	29
5	5	4	4	3	3	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
3	5	4	4	5	4	5	30
4	4	3	3	4	4	4	26
4	4	4	3	3	2	4	24
4	4	3	4	3	3	4	25
5	4	2	2	4	4	5	26
5	3	3	4	3	3	4	25
5	4	5	4	4	4	4	30
5	3	4	3	3	4	5	27
5	5	5	5	5	5	5	35
2	2	5	4	5	2	3	23
5	5	4	3	4	3	4	28
4	5	3	4	5	2	4	27
3	4	4	3	2	2	3	21
3	3	3	3	3	2	1	18
4	4	4	4	4	4	4	28
3	4	3	4	3	2	4	23
4	4	2	4	2	2	4	22
4	4	2	4	2	2	4	22
4	5	4	4	5	4	5	31

4	5	4	4	2	4	3	26
5	5	4	4	3	4	4	29
5	5	4	4	3	4	4	29
4	4	4	4	3	3	4	26
4	4	4	4	5	3	4	28
5	4	4	5	4	4	4	30
5	4	4	5	4	4	4	30
5	5	5	5	4	4	4	32
5	5	5	5	4	4	4	32
5	5	4	5	5	5	5	34
5	5	3	5	3	4	5	30
5	4	4	3	1	4	4	25
3	3	5	5	3	4	3	26
4	4	4	4	4	4	4	28

Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	Total
4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	43
5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	44
5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	47
4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	43
4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	46
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	42
4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	43
5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	48
5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	44

Pengendalian Internal (X3)

X3, 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	X3.. 5	X3. 6	X3. 7	X3. 8	X3. 9	X3. 10	X3. 11	X3. 12	Tot al
4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	49
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	50
4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	53
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	58
4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	53
4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	51
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	56
5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	58
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	55
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	54
4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	49
5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	54
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	48
5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	53
4	4	3	4	5	4	5	5	4	4	4	4	50
5	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	5	51
4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	52
5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	56
3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	48
5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	54
5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	56
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	51

4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	49
4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	54
3	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	55
5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	46
4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	54
4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	57
5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	56
4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	51
5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	51
4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	54
5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	54
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Total
4	5	4	4	5	4	5	4	35
4	4	4	5	4	5	5	4	35
4	4	4	5	4	5	4	4	34
4	5	4	4	5	5	4	5	36
4	5	5	4	5	5	4	5	37
5	4	5	4	4	4	5	5	36
4	4	4	4	4	5	4	4	33
4	5	5	4	5	5	5	5	38
5	4	5	5	5	5	4	5	38
5	4	5	5	4	4	4	4	35
5	5	5	5	4	4	5	4	37
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	4	5	4	5	4	5	37

TOTAL	Pearson Correlation	.578 [*]	.409 [*]	.563 [*]	.437 [*]	.394 [*]	.557 [*]	.578 ^{**}	.489 [*]	.557 ^{**}	.563 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.011	.000	.006	.014	.000	.000	.002	.000	.000	
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



c. Pengendalian Internal (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11
X3.1	Pearson Correlation	1	.260	.188	.230	.109	.258	.024	-.024	-.097	.040	-.096
	Sig. (2-tailed)		.115	.260	.165	.514	.118	.888	.886	.564	.813	.565
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
X3.2	Pearson Correlation	.260	1	.572**	.150	.134	.091	.187	.127	.391*	.431**	.284
	Sig. (2-tailed)	.115		.000	.370	.423	.585	.260	.448	.015	.007	.084
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
X3.3	Pearson Correlation	.188	.572*	1	.273	.059	.223	.210	.150	.385*	.426**	.290
	Sig. (2-tailed)	.260	.000		.098	.727	.178	.205	.369	.017	.008	.077
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
X3.4	Pearson Correlation	.230	.150	.273	1	.377*	.473**	.173	.010	.163	.290	.022
	Sig. (2-tailed)	.165	.370	.098		.020	.003	.299	.954	.328	.077	.897
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
X3.5	Pearson Correlation	.109	.134	.059	.377*	1	.138	.059	.081	.328*	.340*	.183
	Sig. (2-tailed)	.514	.423	.727	.020		.408	.727	.627	.045	.037	.273
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
X3.6	Pearson Correlation	.258	.091	.223	.473**	.138	1	.336*	.336*	.370*	.079	-.009
	Sig. (2-tailed)	.118	.585	.178	.003	.408		.039	.039	.022	.636	.956

N		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
X3.7	Pearson Correlation	.024	.187	.210	.173	.059	.336*	1	.394*	.276	.426**	.199
	Sig. (2-tailed)	.888	.260	.205	.299	.727	.039		.014	.094	.008	.231
N		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
X3.8	Pearson Correlation	-.024	.127	.150	.010	.081	.336*	.394*	1	.181	.259	.129
	Sig. (2-tailed)	.886	.448	.369	.954	.627	.039	.014		.277	.116	.440
N		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
X3.9	Pearson Correlation	-.097	.391*	.385*	.163	.328*	.370*	.276	.181	1	.371*	.519**
	Sig. (2-tailed)	.564	.015	.017	.328	.045	.022	.094	.277		.022	.001
N		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
X3.10	Pearson Correlation	.040	.431*	.426**	.290	.340*	.079	.426**	.259	.371*	1	.674**
	Sig. (2-tailed)	.813	.007	.008	.077	.037	.636	.008	.116	.022		.000
N		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
X3.11	Pearson Correlation	-.096	.284	.290	.022	.183	-.009	.199	.129	.519**	.674**	1
	Sig. (2-tailed)	.565	.084	.077	.897	.273	.956	.231	.440	.001	.000	
N		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
X3.12	Pearson Correlation	.124	.234	.066	.290	.150	.195	.066	.092	.147	.447**	.394*
	Sig. (2-tailed)	.459	.158	.693	.077	.369	.240	.693	.582	.378	.005	.014
N		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
TOTAL	Pearson Correlation	.329*	.603*	.600**	.522**	.454**	.522**	.528**	.441**	.605**	.754**	.560**
	Sig. (2-tailed)	.044	.000	.000	.001	.004	.001	.001	.006	.000	.000	.000

N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Y.7	Pearson Correlation	.261	.040	.284	.100	.032	.018	1	.135	.443**
	Sig. (2-tailed)	.113	.810	.084	.549	.848	.917		.419	.005
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Y.8	Pearson Correlation	.431*	.290	.426*	.073	.340*	.290	.135	1	.717**
	Sig. (2-tailed)	.007	.077	.008	.663	.037	.078	.419		.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38
TOTAL	Pearson Correlation	.664*	.489*	.685*	.335*	.458*	.418*	.443*	.717*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.040	.004	.009	.005	.000	
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Realibilitas

a. Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.722	.726	7

b. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.685	.688	10

c. Pengendalian Internal (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.766	.774	12

d. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.633	.627	8

LAMPIRAN 4

Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN	.120	38	.185	.975	38	.543
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN	.119	38	.197	.950	38	.092
PENGENDALIAN INTERNAL	.125	38	.137	.969	38	.373
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN	.119	38	.197	.950	38	.092

a. Lilliefors Significance Correction

LAMPIRAN 5

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.772	3.936		.450	.655
	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	.023	.053	.037	.428	.671
	AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN	.172	.082	.204	2.104	.043
	PENGENDALIAN INTERNAL	.486	.063	.750	7.727	.000

a. Dependent Variable: TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862 ^a	.743	.720	1.15198

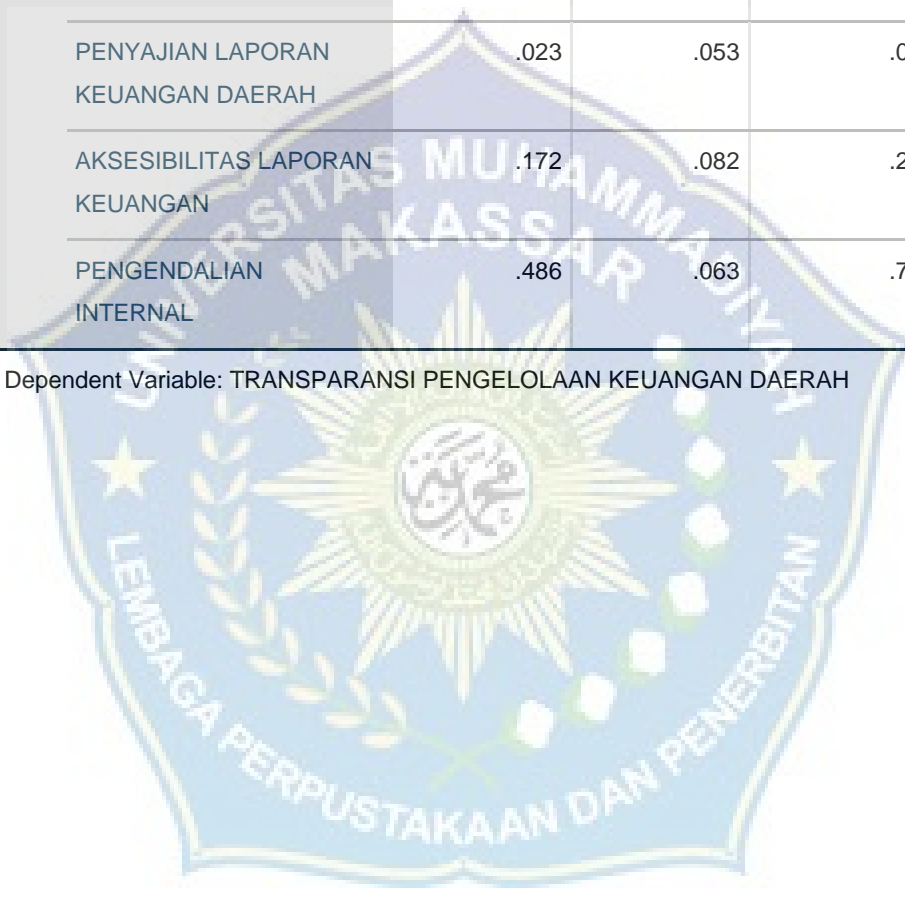
a. Predictors: (Constant), PENGENDALIAN INTERNAL, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN

Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.772	3.936		.450	.655
	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	.023	.053	.037	.428	.671
	AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN	.172	.082	.204	2.104	.043
	PENGENDALIAN INTERNAL	.486	.063	.750	7.727	.000

a. Dependent Variable: TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



LAMPIRAN 6

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (2021)

1. Laporan Realisasi Anggaran

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
1	PENDAPATAN DAERAH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.498.407.798.338,00	1.549.649.873.412,52	51.242.075.074,52	103,42
1.1	Pajak Daerah	301.854.473.673,00	305.929.495.676,52	4.075.022.003,52	101,35
1.1.1	Pajak Daerah	178.777.000.000,00	183.113.097.975,64	4.336.097.975,64	102,43
1.1.2	Retribusi Daerah	5.268.982.400,00	4.246.277.325,50	(1.022.705.074,50)	80,59
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.079.184.191,00	22.896.489.793,00	817.305.602,00	103,70
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	95.779.307.082,00	95.673.630.582,38	(55.676.499,62)	99,94
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.099.435.740.491,00	1.133.306.677.695,00	33.870.937.204,00	103,08
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	973.368.810.491,00	984.912.866.743,00	11.544.056.252,00	101,15
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	126.066.930.000,00	148.393.810.952,00	22.326.880.952,00	117,71
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	97.117.584.174,00	110.413.700.041,00	13.296.115.867,00	113,69
4.3.1	Pendapatan Hibah	79.440.084.174,00	92.833.379.152,00	13.393.294.978,00	116,86
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.677.500.000,00	17.580.320.889,00	(97.179.111,00)	99,45
5	BELANJA DAERAH	1.565.315.094.982,00	1.502.710.316.729,40	(62.605.028.252,60)	96,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.069.471.694.897,00	1.020.460.843.809,88	(49.011.101.087,12)	95,42
5.1.1	Belanja Pegawai	463.377.393.476,00	450.113.688.581,00	(13.263.704.895,00)	97,14
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	517.663.079.397,00	490.019.941.161,62	(27.643.388.235,38)	94,66
5.1.4	Belanja Subsidi	200.000.000,00	199.095.000,00	(905.000,00)	99,53
5.1.5	Belanja Hibah	86.703.504.524,00	78.663.751.067,26	(8.039.753.456,74)	90,72
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.527.717.500,00	1.464.368.000,00	(63.349.500,00)	95,84
5.2	BELANJA MODAL	294.681.085.995,00	282.411.798.100,52	(12.269.287.894,48)	95,84
5.2.1	Belanja Modal Tanah	600.000.000,00	571.282.000,00	(28.718.000,00)	95,21
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.911.314.581,00	52.160.400.224,13	(3.750.914.356,87)	93,26
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.647.671.037,00	97.920.824.771,06	(1.726.846.265,94)	98,22
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.270.770.397,00	131.513.051.105,33	(6.757.719.291,67)	95,11
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	251.330.000,00	246.240.000,00	(5.090.000,00)	97,97
5.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Tetap Lainnya	2.500.000.000,00	1.451.400.000,00	(1.048.600.000,00)	58,06
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	1.451.400.000,00	(1.048.600.000,00)	58,06
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	198.662.314.090,00	198.386.274.919,00	(276.039.271,00)	99,35
5.4	BELANJA TRANSFER	19.722.667.090,00	18.722.629.773,00	(37.317,00)	100,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil				

Lampiran 1/2

5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	178.939.647.000,00	178.663.645.046,00	(276.001.954,00)	99,85
	SURPLUS / (DEFISIT)	(66.907.296.644,00)	46.939.556.683,12	113.847.103.327,12	(70,16)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	78.907.296.644,00	78.907.296.644,25	0,25	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.907.296.644,00	72.907.296.644,25	0,25	100,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.2	Penyerahan Modal Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	66.907.296.644,00	66.907.296.644,25	0,25	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	113.846.853.327,37	113.847.103.327,37	0,00

BUPATI LUWU TIMUR


BUDIMAN

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN	2021	2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	72.907.296.644,25	26.201.839.853,65
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	72.907.296.644,25	26.201.839.853,65
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	113.846.853.327,37	72.907.296.644,25
Sub Total	113.846.853.327,37	72.907.296.644,25
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	113.846.853.327,37	72.907.296.644,25

BUPATI LUWU TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

J21

3. Laporan Operasional

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	1.657.335.333.444,78	1.531.989.072.394,20	125.346.261.050,58	8,18
PENDAPATAN FAKSA DAERAH (PAD)LO	322.956.891.722,78	325.684.017.271,00	-2.727.125.548,22	-0,83
Pajak Daerah-LO	171.133.909.742,49	193.247.251.553,37	-22.113.341.810,88	-11,44
Rendusi Daerah-LO	4.202.738.786,51	4.438.448.298,87	-235.709.512,36	-5,37
Hasil Penyediaan Melayanan Daerah yang Dipisahkan-LO	22.856.489.753,00	23.835.219.109,00	-978.729.356,00	-4,10
Lain-lain PAD yang Sah-LO	124.636.072.422,38	104.123.105.338,76	20.512.967.083,62	19,70
PENDAPATAN TRANSFER-LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO				
Dana Perimbangan	179.450.761.538,00	54.830.087.981,00	124.620.673.557,00	226,85
Dana Bagi Hasil	502.383.009.000,00	508.456.665.000,00	-6.073.656.000,00	-1,20
Dana Alokasi Umum	12.614.699.628,00	66.991.467.900,00	-54.376.768.272,00	-429,85
Dana Alokasi Khusus-Fiskal	68.308.878.143,00	82.374.888.000,00	-14.066.009.857,00	-17,08
Dana Alokasi Khusus-Non Fiskal	879.239.252.310,00	756.635.685.558,00	122.603.566.752,00	16,07
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat-Dana Perimbangan	117.263.644.448,00	0,00	117.263.644.448,00	100,00
Dana Desa	955.022.956.796,00	756.638.685.658,00	198.384.271.138,00	26,22
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	0,00	115.448.707.000,00	-115.448.707.000,00	-100,00
Dana Desa	0,00	115.448.707.000,00	-115.448.707.000,00	-100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat-Lainnya				
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO				
Pendapatan Bagi Hasil-LO	166.884.440.562,00	141.564.577.220,20	25.319.863.341,80	17,90
Bantuan Keuangan	4.568.930.000,00	32.279.321.328,00	-27.710.391.328,00	-82,85
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	171.453.370.562,00	173.843.898.548,20	-2.390.527.986,20	-1,38
Total Pendapatan Transfer-LO	1.165.964.267.318,00	1.048.928.291.506,20	117.035.975.811,80	11,16
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
Pendapatan Hibah-LO	150.534.023.516,00	147.316.763.821,00	3.217.259.695,00	2,18
Dana Donasi-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO	17.580.320.899,00	0,00	17.580.320.899,00	100,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	168.114.344.415,00	147.316.763.821,00	20.797.580.594,00	14,12
BEBAN	1.516.676.421.124,81	1.420.009.047.727,38	96.667.373.397,43	6,81
Beban Operasi	447.884.552.992,00	407.834.811.653,00	39.850.741.339,00	9,77
Beban Pegawai	531.098.063.295,79	447.376.940.827,75	83.721.122.468,04	18,71
Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bunga	199.095.000,00	0,00	199.095.000,00	100,00
Beban Subsidi	84.493.655.842,44	94.120.065.655,79	-9.626.409.813,35	-10,35
Beban Hibah	1.484.368.000,00	20.236.300.000,00	-18.751.932.000,00	-12,78
Beban Bantuan Sosial	312.113.203,35	51.995.885,50	260.117.317,85	500,65
Beban Penyisihan Piutang	179.628.746,19	0,00	179.628.746,19	100,00
Beban Lain-lain	1.838.441.687.145,77	969.618.953.822,04	868.822.733.323,73	89,60
Jumlah Beban Operasi				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	65.545.550.210,85	63.778.493.187,34	1.767.057.023,51	2,78
Beban Penyusutan Perlatan dan Mesin	37.155.806.287,00	38.344.920.194,00	-1.189.113.907,00	-3,10
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	173.602.715.783,00	135.508.987.941,00	38.093.727.842,00	28,11
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	577.995.076,00	0,00	577.995.076,00	100,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	447.632.698,99	0,00	447.632.698,99	100,00
Beban Penyusutan Tak Berwujud	316.538.133,00	509.540.546,00	-192.992.413,00	-60,80
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Total Beban Operasi dan Amortisasi	278.848.459.155,84	238.142.916.838,34	40.705.542.317,50	17,09

Beban Transfer				
Beban Bagi Hasil	19.722.629.773,00	17.262.101.969,00	2.460.527.804,00	14,25
Beban Bantuan Keuangan	178.663.645.046,00	194.985.075.098,00	-16.321.430.052,00	-8,37
Jumlah Beban Transfer	198.386.274.819,00	212.247.177.067,00	-13.860.902.248,00	-6,53
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	140.358.882.321,17	101.900.024.670,82	38.458.857.650,35	37,74
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	38.841.583,35	0,00	38.841.583,35	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	191.360.549,00	0,00	191.360.549,00	0,00
Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional	230.202.132,35	0,00	230.202.132,35	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	6.465.400.098,58	29.350.000,00	6.436.050.098,58	21,929
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	1.457.185.163,47	0,00	1.457.185.163,47	0,00
Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional	7.922.585.262,05	29.350.000,00	7.893.235.262,05	26,893
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-7.692.383.129,70	-29.350.000,00	-7.663.033.129,70	26,109
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	132.666.499.191,47	101.870.674.670,82	30.795.824.520,65	30,23
Pos Luar Biasa			0,00	
Beban Tak Terduga	-1.451.400.000,00	1.708.532.100,00	-257.132.100,00	-15,05
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-1.451.400.000,00	-1.708.532.100,00	257.132.100,00	-15,05
SURPLUS/DEFISIT-LO	131.215.099.191,47	100.162.142.570,82	31.052.956.620,65	31,00

BUPATI LUWU TIMUR

CS Dipindai dengan CamScanner

BUDIMAN

4. Laporan Perubahan Ekuitas

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	3.261.137.182.996,98	3.138.880.903.668,05
SURPLUS/DEFISIT-LO	131.215.099.191,47	100.162.142.570,82
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	1.874.477.000,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(117.900.064.643,75)	20.219.659.758,10
EKUITAS AKHIR	3.274.452.217.544,70	3.261.137.182.996,98

BUPATI LUWU TIMUR

BUDIMAN

5. Neraca

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NERACA
Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	108.749.071.589,63	52.435.799.001,79
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	40,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	108.614.350,00	23.989.900,00
Kas di BLUD	2.606.474.356,00	2.863.471.015,00
Kas Dana BOS	86.456.499,00	564.512.752,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	296.236.532,74	1.469.523.935,46
Kas Lainnya	7.451.149,00	0,00
Setara Kas	2.000.000.000,00	15.550.000.000,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	2.324.249.854,36	14.325.546.799,00
Piutang Retribusi Daerah	68.333.333,33	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	45.392.076.144,00	16.114.721.334,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	14.052.022.105,00	3.461.992.092,00
Piutang Transfer Antar Daerah	57.064.838.399,00	34.997.278.789,00
Piutang Lainnya	2.389.712.571,49	2.744.800.000,00
Penyisihan Piutang	-1.361.995.011,58	-1.049.681.808,23
Beban Dibayar Dimuka	620.087.007,38	465.526.969,57
Persediaan	48.658.272.429,87	59.167.123.573,36
JUMLAH ASET LANCAR	283.061.901.309,22	203.134.604.392,96
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	716.517.440,22	822.773.728,56
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	716.517.440,22	822.773.728,56
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	142.713.649.680,35	142.428.859.835,71
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	142.713.649.680,35	142.428.859.835,71
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	143.430.167.120,57	143.251.633.564,27
ASET TETAP		
Tanah	312.748.261.979,20	298.224.086.389,63
Peralatan dan Mesin	586.635.903.665,53	532.881.362.803,61
Gedung dan Bangunan	1.160.164.317.454,52	1.056.897.823.540,82
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.662.283.423.651,39	2.492.756.788.527,18
Aset Tetap Lainnya	9.099.651.063,74	24.389.468.784,93
Konstruksi Dalam Pengerjaan	69.859.038.330,33	84.441.148.054,10
Akumulasi Penyusutan	-1.943.732.508.133,25	-1.680.180.100.811,66
JUMLAH ASET TETAP	2.857.058.088.011,46	2.809.410.577.288,61
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00

ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	3.622.021.100,00	3.295.991.100,00
Aset Lain-lain	152.171.442.777,52	146.382.896.820,87
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-2.112.826.896,00	-1.496.871.096,32
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-110.542.933.285,98	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	43.137.703.695,54	148.182.016.824,55
JUMLAH ASET	3.326.687.860.136,79	3.303.978.832.070,38
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	449.248.272,05	446.966.089,62
Utang Belanja	45.552.065.282,71	4.214.214.238,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.234.329.037,33	38.180.468.745,79
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	52.235.642.592,09	42.841.649.073,41
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	52.235.642.592,09	42.841.649.073,41
EKUITAS		
EKUITAS	3.274.452.217.544,70	3.261.137.182.996,97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.326.687.860.136,79	3.303.978.832.070,38

BUPATI LUWU TIMUR



b. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 LAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 Desember 2021 dan 2020
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	183.113.097.975,64	192.720.735.828,60
Retribusi Daerah	4.246.277.325,50	4.505.935.086,09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.896.489.793,00	23.835.212.109,00
Lain-lain PAD yang Sah	95.673.630.582,38	107.691.256.634,76
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	984.912.866.743,00	882.372.049.007,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	148.393.810.952,00	169.294.053.550,20
Pendapatan Hibah	92.833.379.152,00	114.784.196.738,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.580.320.889,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.549.649.873.412,52	1.495.203.437.953,65
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	450.113.688.581,00	408.896.345.053,00
Belanja Barang dan Jasa	490.019.941.161,62	493.459.838.352,00
Belanja Subsidi	199.095.000,00	0,00
Belanja Hibah	78.663.751.067,26	70.203.106.147,00
Belanja Bantuan Sosial	1.464.368.000,00	14.080.300.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.451.400.000,00	1.708.532.100,00
Belanja Bagi Hasil	19.722.629.773,00	17.262.101.969,00
Belanja Bantuan Keuangan	178.663.645.046,00	194.388.707.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.220.298.518.628,88	1.199.998.930.621,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	329.351.354.783,64	295.204.507.332,65
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Hasil Penjualan Tanah	0,00	466.997.625,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	466.997.625,00
Jumlah Arus Kas Masuk		466.997.625,00
Arus Kas Keluar	571.282.000,00	486.845.575,00
Belanja Modal Tanah	52.160.400.224,13	48.052.975.854,43
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.920.824.771,06	60.909.470.044,15
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.513.051.105,33	127.319.574.693,47
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	246.240.000,00	197.182.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.000.000.000,00	12.000.000.000,00
Penyerahan Modal Daerah	288.411.798.100,52	248.966.048.167,05
Jumlah Arus Kas Keluar	(288.411.798.100,52)	(248.999.050.542,05)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk	67.914.564.883,00	56.647.014.113,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.914.564.883,00	56.647.014.113,00
Jumlah Arus Kas Masuk		56.647.014.113,00
Arus Kas Keluar	67.914.564.883,00	56.647.014.113,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.914.564.883,00	56.647.014.113,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	40.939.556.683,12	46.705.456.790,60
Kenaikan / (Penurunan) Kas	72.907.296.644,25	26.201.839.853,65
Saldo Awal Kas	7.451.149,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK	113.854.304.476,37	72.907.296.644,25
Saldo Akhir Kas		

BUPATI LUWU TIMUR


 BUDIMAN

LAMPIRAN 7

Dokumentasi Penelitian



Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah



Pengisian Kuesioner Penelitian

LAMPIRAN 8

Surat Izin Meneliti

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 065588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@uulsmuh.ac.id

Nomor : 534/05/C.4-VIII/II/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 Rajab 1444 H
17 February 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 114/05/A-2-II/II/44/2023 tanggal 17 Februari 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SYARAH MONIKA
No. Stambuk : 10572 1113319
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Manajemen
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGARUH ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Februari 2023 s/d 22 April 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

Dr. H. Abd Bakar Idhan, MP.
NBM 1017716

02-23

LAMPIRAN 8

Surat balasan dari instansi





**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SERTIFIKAT

Di Berikan Kepada :

NAMA : Syarah Monika
NO. STAMBUK : 105721113319
JURUSAN : MANAJEMEN
TEMPAT KKP : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur

Sebagai bukti telah mengikuti Kuliah Kerja Profesi (KKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2022/2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Juli s/d 30 September 2022 dengan Nilai :

A - B - C - D -

05 Rabul Awal 1444 H/ 01 Oktober 2022 M

Dekan


Dr. H. Andi Laniari, S.E., M.Si
NBM : 051507



Ketua Panitia


Agusdiwangi Sartini, S.E., M.Acc
NPM : 1005 987



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Syarah Monika

NIM : 105721113319

Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %


Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Mei 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nulsinah Gream, M.I.P
NBM. 964 791

BAB I Syarah Monika 105721113319

by Tahap Tutup

Submission date: 26-May-2023 01:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2102260589

File name: Bab_I_-_2023-05-26T145422.362.docx (18.73K)

Word count: 1190

Character count: 8345

BAB I Syarah Monika 105721113319

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES



7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
2	repository.stie-mce.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	2%
4	ojs.stiem-bongaya.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Southern Illinois University Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Syarah Monika

105721113319

by Tahap Tutup



Submission date: 26-May-2023 01:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 2102261121

File name: BAB_II_-_2023-05-26T145424.593.docx (56.1K)

Word count: 2970

Character count: 21461

BAB II Syarah Monika 105721113319

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX



12%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.neliti.com Internet Source	5%
2	123dok.com Internet Source	4%
3	ejournal.upi.edu Internet Source	4%
4	Submitted to STEI Tazkia Student Paper	2%
5	repository.uma.ac.id Internet Source	2%
6	www.studiseo.com Internet Source	2%
7	repository.unibos.ac.id Internet Source	2%
8	www.scilit.net Internet Source	2%

BAB III Syarah Monika 105721113319

by Tahap Tutup

Submission date: 26-May-2023 01:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 2102261351

File name: BAB_III_-_2023-05-26T145425.977.docx (22.93K)

Word count: 1007

Character count: 6750

BAB III Syarah Monika 105721113319

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE



1

digilib.unhas.ac.id
Internet Source

3%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta
Student Paper

2%

4

Submitted to Universitas Nasional
Student Paper

2%

5

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia
Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography On

BAB IV Syarah Monika

105721113319

by Tahap Tutup

Submission date: 26-May-2023 01:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 2102261629

File name: Bab_IV_-_2023-05-26T145427.477.docx (140.64K)

Word count: 2863

Character count: 18269

BAB IV Syarah Monika 105721113319

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX
14% INTERNET SOURCES
8% PUBLICATIONS
13% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ums.ac.id Internet Source	3%
2	repository.unibos.ac.id Internet Source	2%
3	repo.stiemuhcilacap.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Student Paper	2%
5	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

BAB V Syarah Monika 105721113319

by Tahap Tutup

Submission date: 26-May-2023 01:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 2102263061

File name: BAB_V_-_2023-05-26T145428.327.docx (14.24K)

Word count: 182

Character count: 1309

BAB V Syarah Monika 105721113319

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES



0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

repository.upi.edu
Internet Source

4%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BIOGRAFI PENULIS



Syarah Monika, lahir di Timampu Pada tanggal 21 Oktober 2001, Anak kedua dari 5 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “**Syamsir**” dan Ibunda “**Jumriah**” Penulis bertempat tinggal di desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Penulis pertama kali menempuh pendidikan

tepat pada umur 6 tahun di sekolah dasar (SD) Pada SDN 265 Timampu dan selesai Pada Tahun 2013, dan Pada Tahun yang sama peneliti melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah di MTSN 01 Towuti dan selesai Pada Tahun 2016, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Darunnajah Timampu (MAS) Penulis mengambil jurusan IPS dan selesai Pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019 Penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta Jurusan Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah selesai tahun 2023.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur”.